

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik, yaitu lempeng Euro-Asia di bagian Utara, Lempeng Indo-Australia di bagian Selatan, dan lempeng samudera Pasifik di bagian Timur. Penunjaman (*subduksi*) lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke Utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan mengakibatkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunungapi aktif sepanjang pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Kondisi tersebut membawa konsekuensi logis bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi terutama gempa bumi dan letusan gunungapi (Pribadi,2008, hlm.7).

Menurut Sutawidjaya (2013, hlm.71), Indonesia merupakan negara dengan gunungapi terbanyak di dunia. Setidaknya terdapat 500 kerucut gunungapi, 129 diantaranya merupakan gunungapi aktif dan tersebar di jalur gunungapi sepanjang 7000 km yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Banda hingga Halmahera dan Sulawesi Utara. Dari 129 buah gunungapi yang ada di Indonesia, 35 buah terdapat Pulau Jawa dan 7 diantaranya berada di Jawa Barat. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana geologi khususnya letusan gunungapi. Peraturan Daerah (PERDA) No.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 Pasal 35 tentang Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi butir b, poin 1 menjelaskan bahwa :

Kawasan rawan letusan gunungapi meliputi : a) Kawasan Gunung Salak terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi; b) Kawasan Gunung Gede-Pangrango, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi; c) Kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung Wayang Windu, dan Kawasan Gunung Talagabodas, terletak di Kabupaten Bandung; d) Kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka; e) Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut; f) Kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang; g) Kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten Garut

dan Kabupaten Bandung; dan h) Kawasan Gunung Galunggung terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut;

Bila dicermati pada butir Peraturan Daerah (PERDA) No.22 Tahun 2010 diatas, terlihat bahwa Garut merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang rawan terhadap bencana geologi yaitu bencana letusan gunungapi. Kabupaten Garut memiliki dua buah gunungapi aktif yaitu Gunung Guntur yang berada di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler, Leles dan Samarang, dan Gunung Papandayan yang berada di wilayah Kecamatan Cisurupan. Berdasarkan PERDA tersebut, Garut juga bukan hanya berpotensi terkena dampak bencana letusan dari Guntur dan papandayan, namun juga berpotensi terkena dampak letusan Gunung Galunggung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya.

Temuan lain mengenai keberadaan gunungapi khususnya di Kabupaten Garut dikemukakan oleh Bahtiar (2013, hlm.102). Menurutnya, Jawa Barat bukan hanya memiliki tujuh gunungapi aktif tipe A dan B seperti dijelaskan sebelumnya, namun masih memiliki lima gunungapi tipe C yang dua diantaranya berada di wilayah kabupaten Garut yaitu Kawah Kamojang dan Kawah Karaha. Dengan memperhatikan PERDA dan pendapat diatas, maka Kabupaten Garut selain berpotensi terkena dampak letusan dari Papandayan, Guntur, dan Galunggung, juga berpotensi terlanda bahaya letusan gunungapi dari dua buah gunungapi tipe C yaitu Kawah Kamojang dan Kawah Karaha.

Kabupaten Garut memiliki potensi terdampak berbagai jenis bencana. Potensi ancaman bencana yang sudah ada di Kabupaten Garut akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Garut seperti perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana. Menurut BPBD Garut (2015), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2011, memberi kota Garut angka 139 untuk kota dengan indeks kerawanan bencana tinggi. Angka ini yang tertinggi di Indonesia, mengalahkan 493 kota/kabupaten lainnya. Dengan kata lain, Garut dianggap sebagai kota paling rentan bencana di Indonesia mengalahkan Kota Banda Aceh yang pernah dilanda tsunami hebat pada Desember 2004.

Indeks Rawan Bencana Indonesia disusun berdasarkan riwayat nyata kebencanaan yang terjadi dan menimbulkan kerugian dalam kurun 1815-2011. Pengukuran yang dilakukan IRBI didasarkan pada data terkait jenis bencana, yaitu: abrasi, banjir, epidemi, gempa bumi, gunungapi, kebakaran gedung dan pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, konflik sosial, longsor, puting beliung, tsunami. Sedangkan beberapa parameter yang dipakai di antaranya jumlah kejadian bencana, jumlah korban meninggal dan luka, kepadatan penduduk, serta kerusakan rumah dan infrastruktur. Berikut tabel 1.1 mengenai rekaman kejadian bencana di Kabupaten Garut 10 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jenis Dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Garut 2003 - 2013

JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
Banjir	17
Kebakaran hutan dan lahan	11
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	461
Gelombang pasang / abrasi	2
Gempa bumi	2
Gempa bumi dan tsunami	1
Kekeringan	18
Letusan gunungapi	2
Puting beliung	14
Tanah longsor	62
Epidemi	52
Kegagalan Teknologi	4
Konflik sosial	4

Sumber: BPBD Garut (2014)

Dari Tabel 1.1 diatas tampak bahwa kabupaten Garut merupakan daerah yang rawan terhadap bencana bencana geologi. Tanah longsor merupakan bencana geologi yang paling sering terjadi di kabupaten Garut dalam sepuluh tahun terakhir.

Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut menunjukkan bahwa hingga April 2015 tercatat 42 kejadian yang meliputi bencana tanah longsor (29 kejadian), angin puting beliung (8 kejadian) dan banjir (5 kejadian). Namun dari sederet ancaman bencana seperti dijelaskan diatas, letusan Gunung Papandayan dan Gunung Guntur yang paling menghawatirkan. Walaupun intensitasnya paling sedikit dibanding bencana yang lain, namun lokasi kedua gunung ini berdekatan dengan permukiman warga.

Apabila kedua gunung ini meletus, maka 2,4 juta penduduk atau setengah dari total populasi penduduk Garut yang tersebar di 12 kecamatan akan terdampak.

Tekait dengan bencana letusan gunungapi, sejarah mencatat bahwa pernah terjadi letusan gunungapi yang menelan korban jiwa di Kabupaten Garut. Letusan Gunung Papandayan tahun 1772 menewaskan 2.951 korban jiwa. Setelah itu, Papandayan pernah memperlihatkan aktivitasnya pada tahun 1993, 1998, 2002 dan terakhir pada tahun 2013. Pada 13 - 20 November tahun 2002, Papandayan mengalami erupsi besar. Akibat dari erupsi ini terjadi longsoran pada dinding kawah Nangkak dan banjir disepanjang aliran sungai Cibeureum Gede hingga ke sungai Cimanuk sejauh 7 km, merendam beberapa unit rumah dan menyebabkan erosi besar sepanjang alirannya. Aktivitas kemudian menurun pada tanggal 21 Desember, dan terjadi lagi peningkatan aktivitas pada tahun 2013 namun tidak menimbulkan erupsi.

Kabupaten Garut memiliki dua buah gunungapi aktif yang berpotensi menimbulkan bencana geologi yaitu Gunung Papandayan dan Gunung Guntur. Gunung Guntur adalah merupakan satu dari 4 buah gunungapi yang paling berbahaya di Pulau Jawa (Sastradihardja, 2010, hlm.43). Dari keempat gunungapi yang paling berbahaya itu, 3 diantaranya yaitu : Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Kelud di Kediri dan Gunung Krakatau di Selat Sunda, adalah gunungapi yang paling sering menunjukkan aktivitasnya disamping Gunung Guntur. Walaupun jumlah korban tidak tercatat secara pasti, namun Guntur pernah memperlihatkan aktivitasnya sebanyak 22 kali pada kurun waktu tahun 1690 sampai 1847.

Setelah mengalami masa istirahat yang sangat panjang, Gunung Guntur kembali memperlihatkan aktivitasnya pada 8 September tahun 2013. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Potensi letusan gunungapi Guntur yang sedang berada dalam fase istirahat dijelaskan oleh Tjetjep (2013, hlm.3), sebagai berikut :

“Masa istirahat (*dormant*) yang mencapai 166 tahun hingga saat ini merisaukan para ahli gunungapi. Kerisauan tersebut sangat beralasan, karena dari berbagai pengalaman, makin lama gunungapi beristirahat, makin besar letusan yang akan terjadi. Fakta bahwa endapan material letusan Guntur 1847 tersebar hingga 40 km dari pusat letusan berupa endapan awan panas yang merupakan campuran batuan dan gas bersuhu

tinggi dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, jauh lebih berbahaya dibanding dengan aliran lava yang mengalir ketika masih membara”.

Beberapa gunungapi yang pada awalnya diperkirakan sudah tidak aktif karena terlalu lama beristirahat ternyata mengalami erupsi. Menurut Sudrajat (2013, hlm. 4). Duapuluh tahun yang lalu, kawasan Asia Pasifik digemparkan dengan meletusnya secara berturut – turut beberapa gunungapi. Gunung Unzen di Jepang yang sudah beristirahat selama 30 tahun dan Gunung Pinatubo di Filipina yang sudah tidak menunjukkan aktivitasnya lebih dari 600 tahun, telah menyemburkan batuan pijar dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa manusia. Masa krisis letusan Gunung Pinatubo berlangsung selama 5 bulan. Pada Desember 1998, gunungapi di Belantara Halmahera, Gunung Ibu tiba-tiba meletus. Gunung ini tidak dikenal dan tidak dipantau sebelumnya karena di duga sebagai gunung tipe B, yaitu gunungapi dengan kegiatan solfatara dan tidak ada kabar tentang letusannya sejak tahun 1600. Fenomena menarik diperlihatkan oleh gunungapi tipe B lain yaitu Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara. Gunung Sinabung tiba – tiba meletus pada tanggal 27 Agustus tahun 2010. Setelah jeda selama tiga tahun, Sinabung kembali meletus pada 15 September 2013 dan aktivitas vulkanismenya masih berlangsung sampai sekarang. Kejadian – kejadian tersebut membuka mata para ahli bahwa gunungapi tipe B pun masih bisa meletus bahkan disertai dengan masa krisis yang berlangsung lebih lama.

Pada umumnya orang menganggap bahwa gunungapi tidak berbahaya karena sudah beratus tahun tidak pernah meletus lagi. Hal itu pula yang terjadi dengan penduduk di sekitar kaki Gunung Guntur. Masa istirahat panjang membuat penduduk tidak sadar dengan ancaman bahaya Gunung Guntur. Menurut Arif (2013, hlm.193), Penduduk tidak memiliki pengalaman menghadapi letusan gunungapi karena hampir selama dua generasi tidak pernah menyaksikan Guntur meletus. Mereka berpikir gunungapi ini telah padam sehingga mereka merasa aman dan terlena dengan suguhan air hangat dan udara sejuk yang dipersembahkan oleh Guntur. Mereka cenderung untuk memperlakukan gunungapi itu sebagaimana layaknya tempat lain yang tidak berbahaya.

Keputusan masyarakat untuk tetap tinggal di area yang tergolong sangat dekat dengan Guntur dan Papandayan tidak mengherankan. Sebagai makhluk rasional, orang selalu berupaya memaksimalkan tujuan dengan tanpa

mempertimbangkan risiko yang ada. Menyadarkan masyarakat atas kemungkinan terjadinya bencana yang datangnya sewaktu – waktu bukanlah hal yang mudah. Masyarakat lupa akan bencana yang mengancam kehidupannya, dan tujuan ekonomi menjadi hal terpenting. Mengenai hal tersebut, Supianto (2014 hlm.3), berpendapat bahwa :

“Umumnya, warga yang tinggal di daerah rawan bencana itu merupakan orang-orang yang *termarjinalkan* (terpinggirkan) secara ekonomi, sosial, dan politik. Mereka tidak memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat bertempat tinggal di daerah yang aman dari bencana. Misalnya harga properti atau sewa rumah di daerah yang aman bencana itu relatif lebih mahal, padahal penghasilan mereka jauh dari cukup. Karena itu warga yang tinggal di daerah rawan bencana lebih memilih resiko karena tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk tinggal di pusat kota yang aman, daripada harus tinggal di lereng-lereng gunung atau bantaran sungai. Ketika daya saing ekonomi masyarakat di daerah rawan bencana meningkat, mereka tentu memiliki alternatif untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman dari bencana”

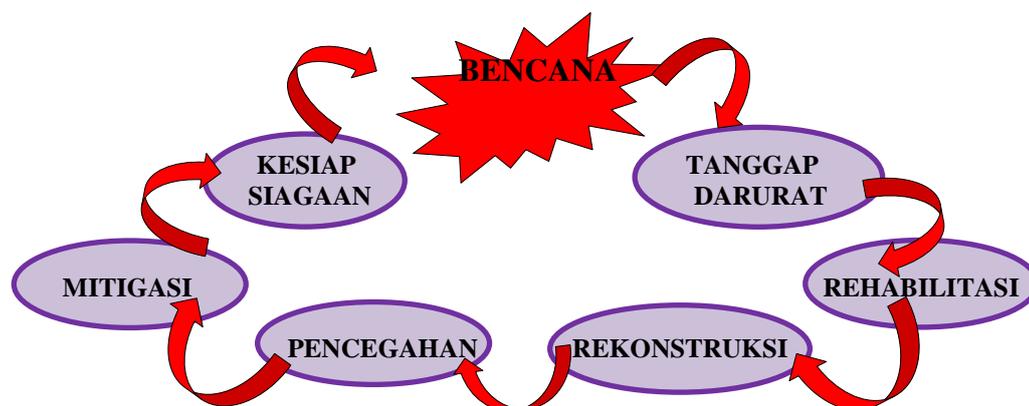
Pilihan untuk hidup berdampingan dengan bencana tidak dapat mengesampingkan keselamatan. Informasi mengenai bahaya letusan gunung api dan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi mutlak diperlukan. Semakin banyak informasi, semakin baik penilaian seseorang terhadap risiko.

Bencana dan segala resikonya merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, begitupun dengan ancaman dari letusan gunung api yang sulit diprediksikan kapan akan terjadi. Selama ini bencana datang selalu diiringi dengan korban jiwa, yang kadangkala dalam jumlah yang sangat banyak. Korban yang jatuh dalam jumlah yang banyak diakibatkan karena manusia tidak mengenali adanya tanda – tanda alam sebelum bencana itu datang sehingga tidak bisa menghindar. Hal yang sama terjadi ketika bencana datang seringkali masyarakat tidak siap dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Pengetahuan masyarakat tentang adanya peringatan bencana dan tindakan – tindakan yang harus dilakukan jika terjadi letusan gunungapi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bercermin dari bencana Sinabung di Sumatera Utara yang terjadi beberapa waktu lalu, masyarakat yang bermukim di Dataran Tinggi Karo yang sudah beberapa generasi tidak pernah melihat kejadian letusan gunungapi serta tidak

dibekali pengetahuan yang cukup mengenai kebencanaan mengalami kebingungan ketika Sinabung Meletus. Masyarakat bingung serta tidak faham harus berbuat apa dan harus kemana. Padahal hal tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sedini mungkin melalui upaya kesiapsiagaan yang dilakukan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam menghadapi bencana letusan gunungapi. Pemahaman kebencanaan bagi masyarakat di kaki gunung menjadi mutlak untuk dimiliki agar akibat yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Pemahaman dan keterampilan berperilaku dalam mencegah, mendeteksi, mengantisipasi bencana secara efektif dapat diawali dengan mengkotruksi berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup, yang diberikan secara sadar kepada masyarakat, dalam menyikapi terjadinya bencana. Upaya untuk meminimalisir risiko bencana dikenal dengan istilah mitigasi.

Dalam Undang – undang No.24 Tahun 2007 dikatakan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana meliputi aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang dapat diawali dari persiapan sebelum bencana itu berlangsung, dan menilai bahaya bencana. Lebih lanjut, penanggulangan bencana dapat berupa penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi. Penanggulangan bencana dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Siklus Penanggulangan Bencana
(Sumber : Ruhimat, hlm.2015)

Bencana muncul ketika ancaman alam, bertemu dengan masyarakat yang rentan dan mempunyai kemampuan yang rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi ancaman itu. Dampak yang muncul adalah terganggunya kehidupan masyarakat. Perubahan paradigma mitigasi dari upaya penanggulangan pasca bencana menjadi siap dan siaga bencana berbasis masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya untuk mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, meniadakan korban akibat bencana serta meningkatkan kemampuan dalam menangani bencana. Namun, memberikan pemahaman kepada masyarakat bukan hanya tanggungjawab satu pihak dalam hal ini pemerintah, namun menyangkut tanggungjawab bersama. Mengenai hal tersebut, Maryani (2012, hlm.2) mengatakan bahwa :

“Mitigasi merupakan kewajiban berbagi pihak baik itu para ahli, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Pengenalan dan pemahaman bencana, proses terjadinya, menilai tingkat bahaya merupakan pekerjaan para ahli seperti ahli gunungapi, hidrologi, kosmografi, klimatologi, seismologi, geografi, pendidikan dan ahli kemasyarakatan. Pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi, mengatasi dan meminimalkan kerugian secara dini”

Pola pengenalan manajemen bencana nampak sangat diperlukan lewat pendidikan. Hal ini sejalan yang damanatkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan data kejadian bencana di Kabupaten Garut, aktivitas Gunung Guntur pada tahun 2013 menyebabkan banyak infrastruktur rusak termasuk fasilitas pendidikan. Menurut BPBD Kab.Garut (2014, hlm.24), erupsi Gunung Guntur menyebabkan 151 unit sekolah rusak berat, 31 sekolah rusak sedang dan 19 sekolah mengalami rusak ringan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang bencana dan pengurangan risiko bencana sangat penting diberikan sejak dini kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman dan pengarahan langkah-langkah yang harus dilakukan saat ancaman bencana terjadi di lingkungan sekolahnya.

Pembelajaran mitigasi bencana diharapkan dapat menjadikan peserta didik memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi terhadap bencana alam yang dapat muncul sewaktu – waktu. Kesiapsiagaan itu sendiri diharapkan dapat disadari oleh diri sendiri dan pada gilirannya akan disampaikan kepada orang – orang terdekat terutama keluarga dan kepada orang – orang yang berada di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Sekolah memiliki peran strategis dalam mendidik dan memberikan materi mitigasi bencana sejak dini yakni mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA. Sejalan dengan hal tersebut, Bahtiar (2013, hlm.111) mengatakan bahwa :

“Upaya sosialisasi mitigasi kebencanaan akan sangat efektif bila dilaksanakan melalui persekolahan. Mata Pelajaran pengetahuan Sosial – Geografi, diberikan dikelas VII-IX (SMP/MTs), dan di kelas X – XII (SMA/MA). Peserta didik dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial/Geografi di SMP dan Geografi di SMA diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan Warga dunia yang baik dalam konstelasi masyarakat global yang dinamis. Mata pelajaran ini dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berkembang secara terus menerus. Kesadaran tindakan dalam menghadapi bencana ini berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan lingkungannya”.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka Geografi dipandang sebagai mata pelajaran yang tepat untuk memberikan pemahaman mengenai bencana dan mitigasinya. Ahmansya (2011, hlm.17), mengutip pendapat James Fraigrive mengenai fungsi dari ilmu geografi. Menurut Fraigrive, *“The function of geography is to train future citizens, to imagine accurately the conditions of the great world stage and so help them to think sanely about political and social problems in the world around.* Geografi memiliki nilai edukatif (*educational value*) yang dapat mendidik warga negara untuk berfikir kritis dan bertanggungjawab terhadap kehidupan di dunia. Manusia adalah pelaku yang penting terhadap perubahan geografi di permukaan bumi. Manusia dapat mengubah kondisi lingkungannya.

Dalam sejarah pendidikan formal, geografi telah hadir sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah sejak masa yang sangat awal. Bahkan sebelum anak sampai umurnya untuk masuk sekolah, pada hakikatnya, tanpa disadarinya anak telah pula mempraktekkan “proses belajar geografi”, yaitu

mengamati, mengenal atau mengidentifikasi keadaan lingkungan untuk mendapatkan gambaran atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang dijumpainya dan bermakna dalam dirinya (Suharyono, 2014, hlm.3).

Tujuan pembelajaran geografi di persekolahan sendiri dikemukakan oleh Daljoeni (1982, hlm.4). Menurutnya, pengajaran geografi di sekolah sebenarnya mengandung dua tujuan : (1) Tujuan materiil yang artinya mempelajari hal – hal untuk diketahui belaka sehingga untuk jenis ini dibutuhkan latihan mengingat: (2) Tujuan formal yang mengandung pengembangan daya cipta, latihan dan sikap pribadi dan kesediaan melayani masyarakat. Hal ini semua berkaitan erat dengan didaktik dan metodik khusus geografi yang perlu diketahui oleh guru geografi.

Berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran khususnya geografi, Sumaatmadja (1997, hlm.71) mengemukakan bahwa :

“Guru geografi bukan hanya dituntut untuk mampu mengajar dan belajar, melainkan juga dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan anak didik belajar (*learn to learn*), mengembangkan anak didiknya mampu belajar memperhatikan (*Learning to watch*), mengembangkan anak didiknya belajar mendengarkan (*learning to listen*), dan mengembangkan anak didiknya belajar membaca (*learning to read*). Intinya, guru geografi berkewajiban mengembangkan kemampuan anak didik untuk belajar sehingga mereka mampu mngembangkan potensinya untuk belajar lebih lanjut, untuk berfikir secara bebas terarah dan krisis kreatif, untuk mencintai tanah air dan dunia pada umumnya melalui bekerja secara kreatif, dan akhirnya mampu hidup sesuai dengan kondisi lingkungan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini”.

Mengingat Kabupaten Garut termasuk daerah di atas “*pacific ring of fire*”, tentu saja letusan gunungapi dengan skala besar kemungkinan besar akan terjadi lagi di masa datang, walau waktu dan intensitasnya tidak bisa diprediksikan dengan pasti. Dengan melihat indikator kepadatan penduduk dan keberadaan beberapa Sekolah di wilayah tersebut, maka peningkatan pemahaman bahaya gunungapi perlu diberikan secara terus menerus kepada masyarakat yang berdiam disekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan pada saat terjadi letusan. Oleh karena itu, Peserta didik sebagai bagian dari masyarakat juga seyogyanya dibekali pengetahuan mengenai kebencanaan agar memiliki keterampilan merespon keadaan darurat atau mobilisasi, serta memulai menyiapkan rencana penyelamatan yang dilakukan ketika bencana datang.

Atas dasar latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembelajaran geografi dan peranannya dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bencana letusan gunung api dan mitigasinya. Penelitian ini ditulis dengan judul **“Peranan Pembelajaran Geografi dalam Pemahaman Bencana Gunungapi dan Mitigasinya di Kalangan Peserta Didik SMA Kabupaten Garut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemahaman peserta didik mengenai bencana gunungapi dan mitigasinya di daerah rawan bencana gunungapi Kabupaten Garut?
2. Bagaimanakah proses pembelajaran geografi mengenai bencana gunungapi dan mitigasinya di daerah rawan bencana gunungapi Kabupaten Garut?
3. Bagaimanakah Peranan Pembelajaran Geografi terhadap pemahaman peserta didik mengenai bencana gunungapi dan mitigasinya di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan beberapa tujuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mendeskripsikan Pemahaman peserta didik mengenai bencana gunungapi di Kabupaten Garut
2. Mengkaji proses pembelajaran geografi dan kaitannya dengan bencana gunungapi dan mitigasinya di daerah rawan bencana gunungapi Garut
3. Mengetahui Peranan Pembelajaran Geografi terhadap pemahaman peserta didik mengenai bencana gunungapi dan mitigasinya di SMA yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gunungapi di Kabupaten Garut

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan ilmu geografi. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah pengetahuan terutama tentang pembelajaran geografi serta peranannya terhadap pemahaman bencana khususnya letusan gunungapi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dan kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan untuk pengembangan profesionalisme karir peneliti.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pembelajaran geografi dan peranannya terhadap tingkat pemahaman peserta didik mengenai bencana gunungapi dan mitigasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan terutama mengenai pendidikan dan penanggulangan bencana gunungapi, sehingga apabila bencana terjadi dapat meminimalisir kerugian harta benda dan jatuhnya korban jiwa.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan mulai Bulan Agustus 2014 dengan Kegiatan Observasi, dan dilanjutkan dengan Penelitian lapangan yang dilaksanakan pada Bulan November 2014 sampai dengan Bulan April 2015. Adapun laporan penelitian ini terdiri dari :

1. Bab I berisi mengenai latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II berisi teori – teori yang digunakan penulis sebagai landasan untuk membuat hipotesis penelitian. Teori – teori yang digunakan antara lain : peranan pendidikan, pembelajaran geografi beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, karakteristik bencana dan ciri – ciri serta dampak bahaya, dan terakhir adalah teori yang berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana gunungapi.
3. Bab III berisi prosedur penelitian yang dimulai dari penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik

analisa data yang digunakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei, dengan penentuan populasi didasarkan pada peta kawasan Rawan Bencana dan hasil Observasi. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan mengukur tingkat pemahaman siswa dengan soal pemahaman yang telah di uji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. sedangkan teknika analisa data digunakan uji regresi setelah sebelumnya dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji Normalitas dan Homogenitas data.

4. Bab IV berisi hasil temuan dan pembahasan. Pada bagian awal, terdapat informasi mengenai keadaan umum daerah penelitian, karakteristik responden dan deskripsi data. Bagian selanjutnya berisi analisis data berupa hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman peserta didik, proses pembelajaran peserta didik dan guru serta peranan pembelajaran geografi dalam memberikan pemahaman mengenai materi kebencanaan khususnya bencana letusan gunungapi dan bagaimana upaya mitigasinya.
5. Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, disertai paparan mengenai keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian pada masa yang akan datang.
6. Daftar Pustaka, yang berisi sumber – sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Sumber – sumber yang dimaksud antara lain : buku, jurnal dan artikel.
7. Lampiran, yaitu bagian pelengkap yang berisi dokumen hasil penelitian. Seperti halnya bagian lain dalam tesis ini, lampiran diberikan nomor urut agar memudahkan pembaca dalam menemukan bagian yang dimaksud.